

MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN: PERLUNYA IMPLEMENTASI “PRA”, PENDEKATAN KULTURAL DAN STRUKTURAL

SRI WAHYUNI

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor

ABSTRACT

This paper describes approaches in providing a chance to people to participate in the agricultural development. The paper consist of four steps namely:1) Introduction activities that should be carried out before implementing the PRA. such as recognizing each other between field staffs and farmers and socialization of the program. 2) Steps and the principles of PRA. 3) . Increasing the participation of people through structural approaches and 4) Increasing the participation of people through structural approaches. It is concluded that to increase the agricultural development , the implementation of PRA is definitely needed. There are three steps and 20 principles of PRA method that should be followed in implementing PRA. Before implementing PRA, recognition and program socialization are needed. In order to get success program, a manual of the program should be prepared. The steps and principles of the PRA should be implemented based on the specific location. To increase the development of agriculture, field staffs should be understand well about the structure and culture of the target village.

Key words: Agricultural Development, Participation and Society

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia terus dilakukan melalui berbagai program, namun keberhasilannya belum sepadan dengan investasi karena antara lain kurang memperhatikan partisipasi masyarakat (Colletta dan Kayam, 1987). Dengan demikian diperlukan pendekatan-pendekatan yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi (Sumardi dan Evers, 1982). FAO (1991) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak azasi, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Kesempatan tersebut perlu diberikan karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan. Masyarakat sendiri yang akan merasakan dan menilai apakah pembangunan tersebut berhasil atau tidak. Maka agar tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah , diperlukan persepsi yang sama antar individu yang terlibat dalam pembangunan. Persamaan persepsi diperlukan mulai dari apa yang harus ditempuh, bagaimana implementasinya, monitoring dan evaluasi. Akhirnya pendekatan partisipatif disadari mutlak diperlukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.

Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, telah terbit berbagai buku pedoman untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Misalnya Direktorat Jenderal Pembangunan Pedesaan (1995) telah menerbitkan panduan untuk fasilitator tingkat desa tentang Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Sedangkan untuk Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara diterbitkan oleh Studio Drya Media (1994). Khusus di bidang pertanian telah terbit buku panduan umum (FAO,1990) dan buku panduan untuk pertanian di lahan kering hasil kerja sama dengan International Institute of Rural Reconstruction ((FAO dan IIRI,1995). Pedoman khusus untuk pengembangan usahatani di lahan rawa telah disusun oleh Mundy dan Muchtar (1996). Inti dari semua buku pedoman tersebut adalah bahwa dalam melaksanakan pembangunan terlebih dahulu perlu diawali dengan penerapan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

Pembangunan mempunyai arti yang luas, termasuk membuat kebijakan yang umumnya diperlukan segera untuk menanggapi isu-isu aktual yang sedang berkembang. Agar kebijakan yang diterapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan isu yang ada, kebijakan tersebut juga harus dibuat melalui partisipasi masyarakat. Untuk kepentingan tersebut, Bechstedt (1998) telah menyusun tahapan dan prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menerapkan metode PRA.

Dengan telah diterbitkannya berbagai buku pedoman tentang PRA dimana satu dengan lainnya saling melengkapi, dirasakan perlu adanya satu metode PRA yang utuh/lengkap. Tulisan ini mengemukakan metode PRA hasil ramuan dari metode yang telah dikemukakan dan pengalaman penulis dalam menerapkan metode PRA. Uraian tulisan meliputi empat hal yaitu: 1) kegiatan yang perlu dilaksanakan sebelum melakukan PRA (Pra - Implementasi PRA). 2) tahapan dan prinsip-prinsip metode PRA. 3) Peningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan struktural dan 4) Peningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan kultural. Informasi ini penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai usaha terus mensosialisasikan metode PRA sebagai kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan.

KEGIATAN SEBELUM MENGIMPLEMENTASIKAN PRA (PRA –PRA)

Partisipasi artinya mengambil bagian atau turut serta dalam suatu kegiatan (Hornby *et al.*, 1984). Partisipasi merupakan suatu proses maka diperlukan pendekatan pendahuluan yaitu pengenalan dan sosialisasi kegiatan (Wahyuni *et al.* 2000). Jadi untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat terdapat dua kegiatan yang perlu dilakukan sebelum mengimplementasikan metode PRA yaitu pengenalan dan sosialisasi program.

1. Perkenalan

Dalam pengenalan ada dua tahapan yang perlu dilakukan. Pertama dari petugas lapangan yang langsung berhubungan memperkenalkan diri kepada masyarakat. Substansi yang perlu diperkenalkan adalah identitas petugas meliputi instansi tempat bekerja dan yang bersifat pribadi dalam keluarga. Identitas hendaknya ditulis lengkap dan jelas sehingga mudah dibaca oleh sasaran program. Status yang jelas ini akan sangat membuka hati masyarakat untuk mempercayai siapa sebenarnya petugas yang hadir ditengah-tengah mereka.

Tahap kedua, petugas lapang secara aktif mengenal masyarakat/sasaran program. Usahakan secepat mungkin menghafal nama, tempat tinggal dan statusnya mulai dari keluarga, dalam kelompok, dalam desa dan status lainnya dalam kelembagaan desa jika ada. Dengan mengenal dan mengingat nama mereka, petugas bisa menyapa dan menyebut nama mereka sehingga tercipta suasana akrab.

Bekaitan dengan pengenalan ini, pengertian pepatah “tak kenal maka tak sayang” sangat penting untuk dihayati dan diterapkan. Setelah masyarakat kenal dan sayang pada petugas dan program yang ditawarkan, maka mereka akan bisa diajak bekerjasama mewujudkan pembangunan. Proses pengenalan terasa agak menyita waktu, tetapi manfaatnya terhadap keberhasilan proyek sangat besar. Salah satu contoh mengenal masyarakat melalui pertemuan formal yang efisien adalah meminta mereka secara bergantian menyebutkan nama lengkap dan panggilan, pekerjaan, status dalam keluarga, kelompok tani, desa dan status lainnya. Jika jumlah kelompok sasaran tidak banyak, mereka secara bergantian diminta menuliskan namanya di kertas karton manila yang ditempelkan di ruang pertemuan. Jika pertemuan di dalam ruangan dimana semua yang hadir duduk menghadap meja adalah dengan membagikan lembaran kertas atau karton berukuran A4. Kertas dilipat empat dan dibentuk segitiga selanjutnya salah satu sisi segi tiga ditulis nama masing-masing dan ditaruh diatas meja. Cara ini sangat memudahkan petugas untuk memanggil dan mengingat nama peserta/petani.

Banyak pendekatan humanis yang bisa dikembangkan petugas lapang untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Pendekatan humanis ini sangat membantu, karena pada dasarnya semua manusia ingin maju dan sejahtera. Pengalaman dari salah satu lokasi proyek pengembangan lahan rawa, salah satu desa di Propinsi Jambi. Ketika itu masyarakatnya dikenal sangat sulit diajak berpartisipasi. Dalam kesempatan tersebut kami melakukan

beberapa pendekatan yaitu di samping memperkenalkan diri juga diceritakan betapa banyak pengorbanan yang dicurahkan untuk sampai ke desa mereka. Tim dari Bogor harus mempergunakan 7 macam kendaraan mulai dari mobil kijang, bis DAMRI bandara, pesawat udara, mobil sewaan, perahu bermotor (*speed boat*), perahu dayung (kelotok) dan terakhir ojeg. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menyadarkan mereka bahwa untuk sampai ke lokasi diperlukan banyak dana, waktu, tenaga dan pikiran yang diperlukan dan pengorbanan yang tidak bisa dinilai dengan uang, terutama bagi petugas yang jauh dari keluarganya. Disampaikan juga bahwa sebenarnya, mereka merupakan sebagian masyarakat yang harus bersyukur karena terpilih sebagai salah satu desa yang mendapatkan bantuan pemerintah. Penjelasan yang telah dikemukakan ternyata dapat menggugah kesadaran mereka, terbukti mereka mengharapkan kedatangan kembali tim kami ke desa tersebut. Pada saat yang sama mereka terbuka minatnya untuk berpartisipasi dengan menyampaikan rencana kerja yang sudah mereka miliki. Saat-saat tersebut dimanfaatkan oleh petugas dengan kegiatan aksi melaksanakan tanam serentak dan ternyata memberikan peningkatan produksi padi (Tamara *et al.* , 2000).

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program sebelum implementasi proyek bukan merupakan hal baru dan selalu dilakukan pada awal kegiatan . Dari pengalaman penulis, pembawa atau pelaku program di desa umumnya mengatakan sudah melakukan sosialisasi. Disadari bahwa mensosialisasikan program bukan suatu tugas yang mudah dan bisa dikerjakan dengan hanya satu kali pertemuan. Sekalipun substansi yang harus disosialisasikan sudah dituliskan secara rinci. Tetapi masih dijumpai petugas yang sengaja tidak melakukan sosialisasi walaupun telah menerima juklak. Alasannya, mereka khawatir dan ragu-ragu jika jadwal implementasi proyek yang sudah disosialisasikan tidak sesuai rencana, tertunda atau bahkan gagal. Petugas memilih mensosialisasikan program ketika implementasi program sudah jelas, sehingga proses sosialisasi tergesa-gesa dan sering kurang difahami petani.

Dijumpai kasus dimana program tidak berhasil karena program belum difahami oleh sasaran, sehingga disarankan kegiatan sosialisasi dilakukan sebelum implementasi proyek dan diulang-ulang selama implementasi pada waktu yang tepat. Sebagai contoh, implementasi suatu proyek pinjaman modal sudah berjalan tiga tahun namun masih dijumpai anggota kelompok tani yang tidak mau mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Salah satu penyebabnya adalah sosialisasi tentang apa jenis proyek yang dilaksanakan (hibah atau kredit/pinjaman) belum difahami seluruh petani (Dewi dan Wahyuni, 2000). Kasus lain

di Kabupaten. Bulukumba (Sulawesi Selatan), seorang peternak yang menerima kredit sapi betina tidak bisa mengawinkan sapinya karena tidak mempunyai pejantan, padahal proyek sudah memberikan sapi pejantan kepada peternak lain di dalam kelompok yang sama. Dalam hal ini peternak sapi betina tidak tahu bahwa pejantan yang diberikan tersebut bisa ia pinjam. Maka ia melewatkan begitu saja kesempatan mengawinkan ternaknya sampai beberapa siklus, dan baru mengemukakan masalahnya ketika tim evaluator berkunjung. Kenyataan ini merupakan bukti bahwa sosialisasi tentang hubungan kerja antar petani dalam kelompok belum difahami oleh sasaran (Wahyuni, 1999). Kesimpang siuran tentang informasi yang diberikan petugas dalam mensosialisasikan dosis pupuk yang tepat juga dilaporkan oleh Wariso (2000).

Dari fakta di atas dapat diambil pelajaran bahwa dalam mensosialisasikan suatu proyek/program sebaiknya dibuat buku keragaan yang dijadikan pedoman bagi semua petugas proyek di lapangan. Substansi dari buku pedoman sosialisasi program hendaknya meliputi jenis program, tujuannya, mengapa dilakukan, kapan jangka waktu implementasinya, dimana saja diimplementasikan, siapa saja yang berkaitan dengan program dan bagaimana program dilaksanakan. Buku pedoman tersebut merupakan acuan untuk mengantisipasi adanya ketidakjelasan program yang akan menyebabkan terhambatnya keberhasilan program.

TAHAPAN DAN PRINSIP-PRINSIP DALAM MELAKSANAKAN METODE PRA

Lahirnya metode partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikarenakan adanya kritik bahwa masyarakat diperlakukan sebagai obyek, bukan subyek. Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) merupakan perkembangan dari metode-metode terdahulu, diantaranya RRA (*Rapid Rural Appraisal*) oleh Chambers (1992).

Definisi yang tepat tentang PRA masih terus diperdebatkan, namun yang perlu dipertegas adalah perbedaannya dengan RRA. Menurut Studio Drya Media (1994), RRA adalah bentuk pengumpulan informasi/data oleh “orang luar” yang kemudian dibawa keluar dan dianalisisnya sendiri. Sebaliknya PRA merupakan kegiatan yang partisipatif. Walaupun teknik yang dipergunakan bisa sama, tetapi “orang luar” hanya berperan sebagai pemandu, perantara atau fasilitator. Masyarakat didorong untuk melakukan kegiatan menggali informasi tentang permasalahan mereka, kemudian menganalisis dan menentukan cara terbaik dalam mengatasi masalah.

Tabel-1 menyajikan data tentang perbedaan tahapan pelaksanaan PRA mengacu pada Studio Drya Media (1994), FAO dan IIRR (1995) dan Bechstead (1998). Perbedaan tersebut

diramu sehingga diperoleh tahapan PRA yang lebih lengkap. Ada tiga tahapan dalam melaksanakan PRA, dimana Studio Drya Media (1994) memberikan tahapan paling rinci, dengan mengeksplisitkan tahap I. Selanjutnya tahap I tersebut dilengkapi oleh Wahyuni *et al.* (2000) dengan pengenalan dan sosialisasi program. Tahap II merupakan inti PRA dan secara eksplisit dikemukakan oleh semua penulis dengan kalimat yang berbeda. Rincian kegiatan yang dikemukakan pada tahap II dalam Tabel-1 adalah rincian asli menurut Bechstedt (1998) yang sengaja dikemukakan untuk kepentingan peneliti. Tahap III secara eksplisit dikemukakan oleh ketiga penulis.

Tabel 1. Tahapan dalam Melaksanakan PRA

Tahapan	Keluaran
<p>Pertama</p> <p>Menyampaikan maksud, tujuan dan proses PRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan 2. Sosialisasi program 	
<p>Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data sekunder 2. Karakterisasi sumber daya lahan 3. Mempelajari pengetahuan local 4. Membuat peta bersama 5. Membuat transek bersama 6. Mengumpulkan informasi secara histories 7. Membuat kalender musim 8. Karakterisasi penggunaan lahan 9. Mobilisasi tenaga kerja 10. Analisis keluarga 11. Membuat diagram ven 12. Memprioritaskan permasalahan 13. Membuat rencana kegiatan 14. Menganalisa potensi dan permasalahan kelembagaan 15. Membuat kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi sistim analisis 2. Permasalahan penting 3. Data sumber daya lahan dan kelembagaan 4. Kebutuhan masyarakat 5. Garis besar intervensi 6. Inovasi kebijakan
<p>Ketiga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Refleksi inti PRA 2. Diskusi dan evaluasi hasil PRA 3. Memanfaatkan hasil PRA untuk program aksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi kegiatan

Ada prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam melaksanakan PRA yang merupakan ciri khas dari pelaksanaan metode PRA. Studio Drya Media (1994) hanya mengemukakan 10 prinsip, FAO dan IIRR (1995) 14 prinsip sedangkan Beschstedt (1998) secara eksplisit mengemukakan 20 prinsip (Tabel 2). Walaupun jumlah prinsip yang dikemukakan antar penulis berbeda, namun inti dari prinsip-prinsip yang dimaksudkan sebenarnya sama. Tabel - 2 tidak menekankan pada urutan kegiatan, namun berdasarkan pengalaman penulis dalam

melaksanakan PRA, prinsip santai, luwes, akrab dalam suasana kekeluargaan serta terbuka merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan pada awal program.

Tabel-2. Prinsip-Prinsip dalam Melaksanakan PRA

No	Prinsip-prinsip dalam Melaksanakan PRA
1	Tunjukkan interest belajar dengan masyarakat
2	Hargai pengetahuan masyarakat
3	Mintalah nasehat dari masyarakat
4	Biarkan masyarakat memilih ketua kelompoknya sendiri
5	Usahakan bertemu dengan masyarakat pada hari pertama kedatangan
6	Mengidentifikasi secara hati-hati dalam memilih informan kunci dan anggota masyarakat untuk dijadikan koperator.
7	Menentukan strata berdasarkan umur, pendidikan, pengetahuan, jender, keberhasilan.
8	Ikut sertakan wanita dan anak-anak..
9	Lakukan studi kasus rumah tangga untuk menemukan variasi informasi
10	Menemui masyarakat pada saat yang tepat
11	Tidak memaksakan jadwal
12	Jika mungkin tinggal bersama masyarakat.
13	Berhati-hatilah dalam menentukan prioritas permasalahan
14	Tim kecil dengan kombinasi profesi, umur, jender
15	Menukar strategi pengumpulan maupun sumber informasi secara reguler diantara anggota tim.
16	Mengkombinasi hasil wawancara dengan observasi
17	Gunakan indikator kunci dalam memperbaiki observasi
18	Menindaklanjuti observasi pada indikator penting Disajikan indikator keberhasilan program pada Tabel-3.
19	Kunjungan lapang 3 – 5 hari
20	Manfaatkan data sekunder semaksimal mungkin

Sumber, :Bechstedt (1998:41-42)

Khusus tentang kunjungan lapang, pada prinsip nomer 11 ditekankan agar tidak memaksakan jadwal, namun pada nomer 19 dinyatakan bisa ditempuh selama tiga sampai lima hari. Menurut pengalaman dan informasi dari beberapa peneliti, jangka waktu tersebut sering tidak bisa dicapai karena di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil masih dijumpai desa yang belum mempunyai data monografi desa. Monografi desa merupakan informasi penting dari penerapan metode PRA maka diperlukan waktu khusus untuk memperoleh informasi tersebut. Suatu pengalaman unik diperoleh di Jawa Barat, ketika kami meminjam data monografi, sekretaris desa mengatakan bahwa monografi masih dipinjam oleh seseorang. Hari berikutnya kami menanyakan lagi namun memperoleh jawaban yang sama. Karena kami sangat membutuhkan data tersebut kami terus bertanya siapa dan dimana pememinjamnya tetapi sekretaris desa tidak mau memberikan keterangan dan mengatakan biar

ia sendiri yang akan memintanya. Namun hari berikutnya justru sekretaris desa tidak mau menemui kami dan akhirnya diketahui bahwa desa tersebut sebetulnya belum mempunyai data monografi. Kasus ini menunjukkan bahwa kami kurang peka dalam menanggapi sikap masyarakat yang masih mempunyai budaya malu untuk mengatakan hal yang sebenarnya.

MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN STRUKTURAL

Di dalam suatu masyarakat, dari yang paling kecil seperti rumahtangga ada tatanan atau struktur tertentu untuk mengatur keberlanjutan masyarakat tersebut. Soekanto (1983) memberikan contoh yang paling sederhana tentang teori struktural-fungsional yaitu struktur tubuh manusia yang terdiri dari kepala, leher, badan dan anggota badan. Masing-masing struktur mempunyai tugas sendiri-sendiri namun tetap diperlukan kerjasama karena struktur yang satu dan lainnya saling tergantung agar bisa menjalankan tugas secara sempurna.

Di dalam pembangunan pertanian juga ada suatu struktur kelembagaan, yaitu: 1) petani/kelompok tani yang bertugas memproduksi, 2) toko sarana produksi, bank dll yang menyediakan sarana produksi, 3) Badan Penelitian dan Pengembangan yang menghasilkan teknologi, 4) Lembaga penyuluhan dan 5) lembaga yang membuat kebijakan (Hermanto, 2001). Agar tujuan pembangunan pertanian terwujud, walaupun masing-masing lembaga mempunyai tugas masing-masing tetapi kelembagaan tersebut harus bekerja sama. Namun sering dijumpai petani tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pelayanan dari kelembagaan terkait sesuai dengan yang diperlukan. Maka petugas pembangunan diharapkan membantu menjembatani petani memperoleh pelayanan dari lembaga yang diperlukan sesuai dengan fungsinya. Menganalogkan teori struktural fungsional dengan usaha pelaku pembangunan dalam membantu petani memperoleh akses pelayanan dari lembaga terkait, dalam tulisan ini dinamakan pendekatan struktural.

Pendekatan struktural paling penting dalam meningkatkan pembangunan pertanian adalah mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pelaksanaan program. Dikatakan penting karena peluang ketidak berhasilan program sangat besar tanpa mengikutsertakan pemimpin formal maupun non-formal di tingkat desa.

Sebagai contoh, suatu kelompok tani menghadapi masalah serangan hama babi hutan yang bersumber di lahan kas desa yang bongkor (lahan tidak digarap). Cara penanggulangannya, lahan tersebut harus dibersihkan. Karena lahan tersebut milik aparat desa, maka untuk membersihkan harus meminta izin kepada aparatnya. Pada waktu

meminta izin tersebut baru disadari bahwa setelah proyek diimplementasikan sekitar tiga tahun baru disadari bahwa proyek belum mengikut sertakan aparat desa. Mulai dari peristiwa tersebut, selanjutnya dijalin hubungan kerja dengan aparat desa yang terbukti dapat berperan sebagai penggerak dalam adopsi teknologi yang dianjurkan (Wiryawan *et al.*, 2000). Contoh lain adalah satu kelompok tani yang dinamikanya sangat rendah dan PPL (Petugas Pertanian Lapangan) dengan memakai nama samaran tega memanfaatkan hak anggotanya untuk memperoleh pinjaman dana bergulir. Setelah ditelusuri, ternyata hubungan kelompok tani dengan PPL dan kepala desa tidak ada. Aparat desa tidak tahu menahu dengan program yang sedang berlangsung di desanya. Menurut ketua kelompok tani, usaha mengundang kepala desa untuk hadir dalam pertemuan kelompok yang dilakukan tiap bulan tidak berhasil.

Usaha tani padi di lahan rawa sangat memerlukan kelembagaan irigasi yang cermat, memerlukan manajemen pengairan khusus yang disesuaikan dengan kandungan pirit di lahan sehingga kerjasama dengan kelembagaan pengairan sangat diperlukan. Namun petani lahan rawa umumnya berada di lokasi terpencil dan sarana komunikasi terbatas, sehingga sulit mencapai kelembagaan yang diperlukan. Dalam kasus seperti ini sangat diperlukan bantuan dari petugas lapang untuk membantu menjalin hubungan dengan lembaga Pekerjaan Umum (PU). Contohnya petani di desa Harapan Jaya, Kecamatan Indragiri Hilir (Propinsi Riau), lahan usahatannya teroksidasi karena fihak PU membuat saluran tersier terlalu dalam sehingga permukaan air di saluran tersier lebih rendah dari permukaan air lahan sawah. Kondisi ini menyebabkan lahan sawah tidak tergenangi air sehingga teroksidasi dan tidak bisa diusahakan untuk usaha tani. Untuk mengatasi masalah tersebut petugas ISDP (Integrated Swamps Development Project) Riau telah menyampaikan masalah yang dihadapi petani kepada fihak PU. Usaha tersebut ternyata mendapat tanggapan terbukti adanya perbaikan-perbaikan bendungan yang telah dilakukan (Herawati *et al.* 2000).

Pentingnya dukungan secara struktural untuk meningkatkan produksi padi, khususnya di musim “gadu” atau kemarau, sangat dirasakan oleh petani di Tanjung Jabung (Jambi). Namun mereka belum mampu menjalin hubungan dengan kelembagaan yang diinginkan. Dengan bantuan Mantri Tani setempat selanjutnya dilakukan pertemuan kelompok tani dan kelembagaan terkait. Kelembagaan terkait terdiri dari staf BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih), aparat desa, tim teknis dan konsultan ISDP. Dalam pertemuan tersebut petani mengutarakan masalahnya dan ternyata mendapat respon dari kelembagaan terkait yang diikuti dengan program aksi. Fihak BPSB mengawasi penanaman padi sejak tanam, dalam penyeleksian sampai sertifikasi sehingga diperoleh produksi yang baik dan harga tinggi (Wiryawan *et al.*, 2000).

Contoh pendekatan struktural lainnya dilakukan oleh Dewi dan Wahyuni (2000) yaitu dalam menjalin kerjasama antara anggota Kelompok Tani Karya Indah di desa Awal Terusan (Kecamatan Sirah, Pulau Padang – OKI – Sumatera Selatan) dengan koperasi IPPTP Kayu Agung. Kerjasama tersebut dilakukan karena adanya laporan bahwa petani tidak bisa menerapkan dosis pemupukan sesuai dengan anjuran karena harga pupuk mahal dan lokasi kios saprodi sulit dijangkau. Toko saprodi terdekat berjarak 30 km dan harus ditempuh dengan tiga kali ganti kendaraan yang frekwensi keberadaannyapun sangat jarang. Setelah terjalin kerjasama, maka koperasi menyediakan pupuk di lokasi sesuai dengan permintaan dan petani membayar dalam jangka waktu yang disepakati. Dilaporkan semua petani membayar biaya pupuk tepat waktu sesuai perjanjian dan produksi meningkat dari 2 – 2,5 menjadi 3 – 3,5 ton/ha. Pada musim selanjutnya adopsi teknologi pemupukan meningkat dari 60% menjadi 99%.

Kelompok Tani di Desa Parit Keladi (Kalimantan Barat) menghasilkan padi dan sayur mayur yang bagus tetapi sulit mengirimkan kepada pelanggan karena jalan desa rusak. Namun berkat usaha petugas lapang ISDP dan PPL, pembeli yang sudah merupakan pelanggan bisa memahami keadaan dan bersedia memberikan bantuan batu kali sebanyak tiga truk untuk memperbaiki jalan yang rusak (Wahyuni dan Sukarja, 2000).

Dari kasus-kasus yang dikemukakan di atas diperoleh tiga hal penting. Pertama petani sangat memerlukan bantuan dalam menjangkau kelembagaan untuk melancarkan usahataniya namun mereka belum mampu. Kedua, pendekatan struktural sangat diperlukan dalam meningkatkan pembangunan pertanian. Ketiga pendekatan struktural yang diperlukan di suatu program ditentukan oleh kebutuhan wilayah masing-masing.

MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN KULTURAL

Kultur atau kebudayaan adalah perilaku berpola yang ada dalam kelompok tertentu yang anggotanya memiliki makna, simbol dan cara yang sama untuk mengkomunikasikan makna tersebut (Colletta dan Kayam, 1987). Unsur-unsur kebudayaan tersebut meliputi pranata atau aturan tersurat maupun tersirat dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama. Kebudayaan umumnya terbentuk dalam waktu yang lama dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan tercermin dalam perilaku (termasuk dalam kegiatan usahatani) suatu individu atau masyarakat. Dengan demikian setiap usaha memperkenalkan suatu teknologi baru kepada petani harus mempertimbangkan kebudayaan yang berlaku dan dianut

mereka sehingga diketahui strategi (timing atau momennya, cara pendekatan , jenis pengetahuan yang diperkenalkan dll.) yang tepat dalam memperkenalkannya. Berikut ini dikemukakan beberapa kasus sebagai contoh kepedulian dan ketidak pedulian pelaku pembangunan pertanian dalam memanfaatkan kebudayaan masyarakat untuk membangun pertanian.

Dalam usaha meningkatkan produksi ternak kambing dan domba telah dihasilkan serangkaian teknologi (aspek pemulia biakan, nutrisi, tata laksana, kesehatan dan ekonomi) yang selanjutnya dikemas dalam satu buku “Kumpulan Peragaan Berternak Kambing Domba di Pedesaan” (Ludgate, 1989) yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Jawa dan Sunda . Teknologi tersebut telah diterapkan di beberapa desa di Jawa Barat. Setelah setahun proyek berakhir dan dilakukan evaluasi (Wahyuni *et al.* , 1994) diperoleh informasi bahwa beberapa teknologi yang tidak diterapkan oleh peternak disebabkan peternak mempunyai cara tersendiri berdasarkan pengalaman mereka dan memberikan hasil lebih baik.

Sebagai contoh peternak dianjurkan menyediakan garam di dalam bambu dan memberikan air minum di dalam ember, tetapi masyarakat tidak menerapkannya karena jika garam disediakan terus menerus dan ternak memakannya setiap saat maka nafsu makan akan meningkat dan ternak akan menjadi kegemukan dan akhirnya mandul. Sedangkan air yang ditaruh di dalam ember akan ditendang oleh ternak dan tumpah sehingga sulit diketahui apakah ternak sudah minum atau belum. Cara petani memberikan garam pada ternak adalah mencampur garam dengan air lalu memercikkannya pada rumput yang disediakan untuk ternak . Sedangkan air minum yang diberikan adalah air cucian beras (*leri*) yang ditaruh pada baskom atau sejenisnya dan diberikan langsung pada ternak sampai habis. Contoh lain adalah anjuran tata laksana pengandangan ternak, agar antara ternak yang berbeda umur(pejantan, anak lepas sapih, dara dan induk sedang bunting) diberi sekat. Petani tidak mau menerapkan anjuran untuk anak-anak kambing-domba yang masih menyusui dan induk yang sedang bunting. Alasan mereka anak kambing sering terperosok dan jika itu terjadi dimalam hari berarti dan tidak diketahui akan menyebabkan kematian. Demikian juga untuk induk bunting yang sudah dekat saat melahirkan , peternak memilih menurunkannya di halaman rumah pada siang hari dan membawanya ke dapur pada malam hari sehingga kalau sampai mereka tidak mengawasipun ternak masih mungkin bisa melahirkan dengan selamat. Belajar dari kenyataan tersebut, BALITNAK membuka diri untuk belajar dari peternak dengan mengadakan penelitian tentang *indigenous knowledge* peternak dalam aspek pakan, pemuliabiakan/reproduksi dan pemeliharaan kesehatan (Wahyuni , 1994) Khusus tentang tanaman obat dilaporkan ada 49 jenis yang 6 diantaranya paling banyak digunakan untuk

mengobati ternak sakit dan menjaga kesehatan ternak. Selanjutnya salah satu jenis tanaman yaitu buah buni diteliti keefektifannya sebagai obat cacing di Balai Penelitian Veteriner (Murdiati *et al.* 1992) yang kemudian diuji kembali di lapangan bersama peternak. Menurut Adnyana dan Edi Basuno (2001) kegiatan semacam ini dinamakan improvisasi *indigenous knowledge* secara partisipatif dan akan menjamin sustainabilitas penerapan teknologi tersebut.

Pemanfaatan adat istiadat dalam pengembangan ternak dilakukan di desa Genjahan (kecamatan pojong, Gunung Kidul) ,Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dinamakan “Gumbregan” (Wahyuni *et al.*, 1993). Upacara gumbregan dilakukan setahun sekali untuk memperingati Nabi Sulaiman, satu-satunya nabi yang menguasai bahasa hewan, sedangkan makna *gumbreg* (bahasa jawa) adalah “mohon keselamatan” maka dengan mengadakan upacara gumbregan peternak memohon keselamatan atas ternak yang dipelihara. Pada saat upacara tersebut kandang ternak dibersihkan, ternak dimandikan dan dihiasi serta sebagian dilombakan yang disaksikan oleh kelembagaan terkait dan saat itu kebetulan Bupati juga hadir. Saat tersebut merupakan gabungan antara pendekatan kultural dan struktural yang sangat tepat. Bukti dari efektifnya pendekatan tersebut adalah Kecamatan Pojong berhasil sebagai kecamatan pertama di DIY yang berhasil mengentaskan kemiskinan. dengan kemampuan sendiri.

Dalam mengentaskan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia, pemerintah memberikan proyek integrasi ternak dalam usahatani. Pada tahun pertama hanya 30 petani dari 439 rumahtangga miskin yang akan memperoleh ternak. Rumahtangga lainnya akan mendapatkan ternak dari hasil perguliran ternak yang telah diterima keluarga pada tahap pertama. Pemilihan tersebut ditentukan oleh masyarakat dengan fasilitator petugas lapang dan aparat desa. Dengan cara demikian ternyata petani calon penerima guliran berikutnya sangat membantu dalam memonitor perkembangan ternak dan berperan sebagai kontrol sosial . Dengan pendekatan partisipatif , desa tersebut merupakan salah satu desa yang perkembangan ternaknya bagus (Wahyuni, 2001).

Pendekatan kultural dan cultural yang sangat kental dalam pembangunan pertanian dijumpai di Bali (Adiyoga dan Wahyuni, 2000). Dalam setiap tahapan kegiatan usahatani didahului oleh upacara adat yang isinya memohon kepada Tuhan agar usahanya dapat berjalan lancar dan memberikan hasil bagus. Dilakukannya permohonan diawal kegiatan mencerminkan bahwa secara teknis mereka sudah siap untuk melakukan kegiatan dan akan melaksanakannya secara sungguh-sungguh. Upacara tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan petani sehamparan tata air yang dikenal dengan subak. Dalam berdoa secara bersama-sama tersebut partisipasi dari seluruh petani tercermin, secara

moral mereka bertanggung jawab bersama-sama dalam keberhasilan berusaha tani. Kegiatan kultural yang dilakukan secara bersama-sama di *Pura* adalah upacara menjelang suatu musim tanam yang dinamakan *Pengwiwit*., Upacara menjelang panen disebut *Mesaba* dan menjelang *nyepi* di mana seluruh areal sawah dikelilingi dengan arak-arakan *Barong Rande* . Sedangkan upacara yang dilakukan secara individu di *Sanggah* (pura kecil di masing-masing keluarga) adalah sebelum mengolah lahan , sebelum tanam (*sane mungguh*) , satu bulan setelah tanam. Walaupun dilakukan secara individu, hari upacara ditetapkan secara bersama oleh seorang pemimpin adat (*pekaseh*) di mana dalam rapat penentuan hari tersebut sekaligus dilakukan diskusi berkaitan dengan masalah dan segala sesuatu demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan usahatani. Yang terpenting setelah upacara bulan pertama ini adalah keesokan harinya petani tidak boleh menengok lahannya selama sehari penuh dan membiarkan hamparan sawah sunyi-senyap untuk memberikan kesempatan kepada alam tidak terganggu oleh ulah manusia.

Di samping memperhatikan aspek kultural, aspek sumberdaya yang dimiliki oleh keluarga tani juga perlu dipertimbangkan dalam penerapan teknologi baru. Sebagai contoh pengenalan penggunaan benih unggul di desa Parit(Kapuas, Keladi Kalimantan Barat) . Petani yang penguasaan lahannya rata-rata sekitar 2 ha (petani transmigran) tidak mau menerapkan penggunaan bibit unggul di seluruh lahan miliknya. Hal ini karena mereka tidak mereka tidak mempunyai cukup tenaga kerja. Untuk mempersiapkan lahan mereka harus mengupah atau menyewa traktor yang biayanya sangat mahal. Disamping itu waktu tanam yang terbatas memaksa mereka harus mengeluarkan upah tanam, demikian juga waktu panen harus diborongkan karena waktu panen yang harus serempak dan jangka waktunya pendek. Dengan pertimbangan tersebut petani memakai benih campuran yaitu sebagian lahan ditanami dengan benih unggul dan sebagian lagi dengan benih lokal yang persentasenya disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja dan modal yang dimiliki (Wahyuni, 1997).

Dari contoh-contoh yang telah dikemukakan membuktikan bahwa pendekatan kultural dapat meningkatkan pembangunan pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebelum mengimplementasikan metode PRA diperlukan tahapan pengenalan dan sosialisasi program. Dalam pengenalan sebaiknya dilakukan pendekatan humanis sedangkan dalam sosialisasi proyek/program sebaiknya dibuat buku keragaan sebagai pedoman bagi semua petugas proyek di lapangan . Sosialisasi perlu dilakukan baik sebelum maupun

selama implementasi program. Substansi dari buku pedoman sosialisasi program hendaknya meliputi jenis dan tujuan program,, mengapa dilakukan, kapan jangka waktu implementasinya, dimana saja diimplementasikan, siapa saja yang berkaitan dengan program dan bagaimana program dilaksanakan.

Ada tiga tahapan dan 20 prinsip yang harus dilaksanakan dalam menerapkan metode PRA. Walaupun tidak ada urutan dalam menerapkan prinsip tersebut namun dalam awal kegiatan sangat diperlukan pengenalan dalam suasana santai, lues dan akrab.

Petani sangat memerlukan bantuan dalam menjangkau kelembagaan untuk melancarkan usahataniya , maka petugas pelaksana program pembangunan hendaknya membantu mereka melalui pendekatan struktural . Perlu diperhatikan bahwa pendekatan struktural yang diperlukan di suatu program ditentukan oleh kebutuhan wilayah masing-masing.

Saran

Dalam meningkatkan pembangunan pertanian mutlak diperlukan implementasi metode PRA. Untuk menyamakan persepsi dan mensosialisasikan program diperlukan buku panduan. Substansi dari buku pedoman sosialisasi program hendaknya meliputi apa jenis program, tujuannya, mengapa dilakukan, kapan jangka waktu implementasinya, dimana saja diimplementasikan, siapa saja yang berkaitan dengan program dan bagaimana program dilaksanakan.

Tahapan dan prinsip-prinsip metode PRA perlu diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Petugas pelaksana pembangunan hendaknya menguasai stuktur dan kultur wilayah yang akan dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoga, W. dan Sri Wahyuni. 2000. Studi Diagnosis Lokasi Pengkajian Corporate Farming di Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan-Bali. Laporan intern. PSE-BADAN LITBANG-DEPTAN. Pp35.
- Adnyana, M. Oka dan Edi Basuno. 2001. Improvisasi Indigenous Technology dalam Pengembangan Pertanian Lahan Rawa Berkelanjutan. Pros. Sem. Nas. Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa. Buku-I. PUSLITBANGTAN – BOGOR Cipayung, 25 – 27 Juli. P153-166.
- Bechstet, Hans Dieter. 1998. MSEC Training Workshop on Project Management and Approaches for Catchment Research. Phrae. Thailand. 57pp.

- Cambers, R. 1992. Rural Appraisal: Rapid. Relaxed and Participatory. Institute of Development Studies. England. 20 Pp,
- Colletta, Nat J dan Umar Kayam. 1987. Kebudayaan dan Pembangunan. Yayasan Obor Indonesia. Pp.333.
- Dewi, R dan Sri Wahyuni. 2000. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam Difusi dan Adopsi Teknologi SUT Lebak. ISDP- Puslitbangtan. Bogor. Pp18.
- Direktorat Jenderal Pengembangan Desa. 1995. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa. Buku A. Departemen Dalam Negeri. Pp.80.
- FAO. 1990. Taking Hold of Rural Life. RAPA Bangkok – Thailand. 127pp.
- FAO. 1991. Participatory Monitoring and Evaluation. RAPA Bangkok – Thailand. 51pp.
- FAO dan IIRR. 1995. Resource Management for Upland Areas in Southeast Asia. Farm Field Document.2. FAO – Bangkok – Thailand and IIRR, Silang – Cavite. Phillipines. 207 Pp.
- Herawati, T., Suwalan, S., Haryono dan Sri Wahyuni. 2000. Peranan Wanita Tani Dalam Usahatani Keluarga di Lahan Rawa Pasang Surut. Pengembangan Pertanian Lahan Rawa Berkelanjutan. Pros. Sem. Nas. Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa. Buku-I. PUSLITBANGTAN –BOGOR Cipayung, 25 – 27 Juli. p. 247 – 258.
- Hermanto. 2001. Perkembangan Kelembagaan Pertanian. Dalam Bunga Rampai Ekonomi Beras. Suryana dan Mardianto (Eds). Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Hal 1- 13.
- Hornby. Parnwell. Siswojo dan Siswojo. 1984. Kamus Inggris Indonesia. Oxford University Press. P.419.
- Ludgate. Patrick. J. (ed) 1989. Kumpulan Peragaan dalam Rangka Penelitian Ternak Kambing dan Domba di Pedesaan. BALITNAK – SR CRSP. Pp.55. PUSLITBANGNAK, BADAN LITBANG – DEPTAN.
- Mundy, P dan Muchtar Rusdi. 1996. Pendekatan Partisipatif dan Transformasi Sosial Dalam Pengembangan Sistem Usahatani Lahan Rawa. Indeco duta utama - Cakra Hasta – EUROCONSULT. Pp. 7.
- Murdiati, T.B., Sri Wahyuni ., Roemantio, H.S dan E. M. Mundy. 1992. Tumbuhan dalam pengobatan Etnoveteriner pada Ternak Ruminansia di Jawa Barat. Pros. Sem. Dan Lokakarya Nasional. Etnobotani. Dep. PDK dan LIPI. Cisarua, Bogor, 19 – 20 Pebruari. P 67 – 71.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat. CV Rajawali Jakarta. Pp 303.
- Studio Drya Media. 1994. Berbuat Bersama Berperan Setara. Bahan Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara. Pp.164.
- Sumardi, Mulyanto dan Hans Dieter Evers. 1982. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. CV. Rajawali dan YIIS. Jakarta. 341pp.
- Tamara, Erna., Sri Wahyuni., Suwalan, Jumakir dan Uka Kusnadi. 2000. Pemberdayaan Kelompok Tani di Lambur-II. Jambi. Pros. Sem. Nas. Penelitian Pengembangan Pertanian Lahan Rwa, Cipayung 25 – 27 Juli. PUSLITBANGTAN – BOGOR. P. 145 – 154.

- Wariso. RAM. 2000. Faktor Penghambat Pengembangan Pertanian dan Pendekatan osbud. Cakra Hasta Konsultan dan AHT Internasional GmbH. 16pp.
- Wahyuni , Sri. 1992 Reevaluation of Outreach Pilot Project. BALITNAK- SR CRSP, PUSLITBANGNAK, Bogor. P 1-30.
- Wahyuni , Sri. Ruth M. Gatenby and M. F. Nolan. 1994. Farmers Indigenous Knowledge in Small Ruminant Production System. Sustainable Animal Production and the Environment. Procc. Of the 7th. AAAP Animal Science Congress. Bali, Juli 11 – 16. Ikatan Sarjana Ilmu-ilmu Peternakan Indonesia. P.145 – 146.
- Wahyuni , Sri., Sri Rahmawati dan A. Suparyanto. 1993. Kelumintuan Usahatani Ternak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Kumpulan Makalah Peranan Wanita dalam Sistem Usahatani Ternak di Jawa dan Bali. PUSLITBANGNAK – Proyek Pengembangan Penelitian Pertanian Nasional. P 104 – 140. Bogor
- Wahyuni, Sri. 1997. Laporan Penelitian Pemberdayaan Kerjasama Kelompok Tani di FSTA. Parit Keladi. Pontianak. Kalimantan – Barat. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian- ISDP. Bogor. Pp. 1-33.
- Wahyuni , Sri dan M. Sukarja. 2000. Kelembagaan Penunjang *Acquisition System* Teknologi Sistem Usahatani Pasang Surut. Pros. Sem. Nas. Penelitian Pengembangan Pertanian Lahan Rawa, Cipayung 25 – 27 Juli. PUSLITBANGTAN – BOGOR. P 392 – 402.
- Wahyuni, Sri. 1999. The Impact of PUTKATI on Farmers’s Welfare. Direktorat Jenderal Peternakan – Anzdec. Laporan intern. Pp.32.
- Wahyuni, Sri., Sianturi A. dan T. Herawati. 200. Peranan Sosialisasi dalam Pembangunan Pertanian Lahan Rawa. Pros. Seminar Pengembangan Lahan Rawa. Riau. P.247 – 258.
- Wahyuni, Sri. 2001. Pendekatan Sosiobudaya dalam Pengembangan Peternakan di Sulawesi. Jurnal Pengembangan Peternakan Tropis. Edisi khusus. Seminar Nasional Komunikasi Hasil Penelitian / Pengkajian. FAPET – UNDIP dan BPTP-Ungaran. Semarang, 11 Oktober. P. 299 – 308.
- Wiryanan. I. G., Herman S., Sri Wahyuni, Erna Tamara dan Suwalan. 2000. Rekayasa Kelembagaan dan Pengembangan Modal Kelompok Mendukung Pengembangan Teknologi Usahatani Pasang Surut. Seminar “ Memacu Pembangunan Pertanian Lahan Pasang Surut Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Serta Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Kerja”. Kuala Tungkal. Jambi. 27 – 28 Maret 2000. P.220 – 231.